

==Weekly Tax Updates==

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 53,04 Triliun hingga April 2026

Penerimaan negara dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 53,04 triliun hingga 30 April 2026. Kontribusi terbesar masih berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) yang terus tumbuh seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital di Indonesia. Selain PPN PMSE, penerimaan pajak ekonomi digital juga ditopang oleh pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), pajak fintech, hingga pajak aset kripto. Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menyumbang Rp 39,94 triliun. Sementara itu, pajak SIPP memberikan kontribusi Rp 5,18 triliun, pajak fintech Rp 4,88 triliun, dan pajak aset kripto sebesar Rp 2,03 triliun.



Ditjen Pajak Kejar Penagihan Rp 28,38 Triliun dari Para Pengemplang Pajak di 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penagihan pajak sebesar Rp 28,38 triliun sepanjang 2026 dari wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Hingga April 2026, realisasi penagihan telah mencapai Rp 5,81 triliun atau sekitar 20,47% dari target tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengimbau wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera menyelesaikan kewajibannya. "DJP mengimbau wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar dapat segera berkomunikasi dengan kantor pajak setempat untuk memperoleh penjelasan maupun penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Inge.

Purbaya Sudah Lapor Prabowo, 10 Eksportir Sawit Curang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons Presiden Prabowo Subianto setelah mendapatkan laporan 10 perusahaan besar pelaku manipulasi faktur perdagangan atau under invoicing. Perusahaan itu bergerak di sektor industri kelapa sawit. Purbaya memberikan laporan itu saat rapat terbatas dengan Prabowo, di Istana Negara, bersama sejumlah menteri. "Laporan. Pokoknya itu memperkuat dugaan beliau selama ini kan bahwasannya memang ada seperti itu, dan itu datanya kan sangat kuat sekali," kata Purbaya, saat ditanya respons presiden usai mendapatkan laporan.



Tarik Investasi, Ini Bocoran Insentif Pajak Baru di Era Pajak Global

Pemerintah menyiapkan perubahan desain insentif perpajakan seiring penerapan Global Minimum Tax (GMT) yang mulai diadopsi Indonesia mengikuti kesepakatan OECD dan G20. Sejumlah insentif konvensional dinilai perlu disesuaikan agar tetap efektif menarik investasi tanpa kehilangan hak pemajakan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah saat ini tengah membahas berbagai alternatif insentif pajak pasca implementasi GMT, mulai dari *accelerated depreciation*, *tax allowance*, *investment allowance*, kredit pajak hingga *super deduction* berbasis riset dan vokasi. Pemerintah juga mengusulkan modifikasi *investment allowance* dengan menambah persentase pengurangan biaya serta memperkenalkan skema insentif berbasis kredit pajak.



Ekspor SDA lewat BUMN Ekspor, Airlangga Pastikan Aturan Teknis Terbit Sebelum 1 Juni

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan aturan teknis terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) akan terbit sebelum 1 Juni tahun ini. Beleid anyar ini nantinya akan mengatur terkait pelaksanaan dari ekspor yang akan dilakukan satu pintu oleh Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). "Nah tadi kami laporkan bahwa regulasi instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan sebelum 1 Juni itu harus diselesaikan," jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026). Lebih lanjut, Airlangga menanggapi kekhawatiran pelaku usaha bahwa BUMN Ekspor ini justru akan menghambat kinerja ekspor.



Hitungan Purbaya: Restitusi Pajak Tahun Ini Bisa Bengkak Rp480T

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan nilai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak restitusi yang dibayarkan tahun ini akan lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut ia ungkapkan saat Konferensi Pers APBN KITA April 2026. "Sampai sekarang sudah kita keluarkan 160 triliun, dibanding tahun lalu full year itu Rp360 triliun, setahun penuh. Ini kan baru 4 bulan kalau kita kali 3, Rp480 triliun kira-kira," katanya. Meskipun demikian, Purbaya menegaskan akan meneliti lebih dalam mengenai pengembalian pajak tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada kongkalikong.

Dirjen Pajak Ungkap Ada 722 Grup Perusahaan Terdampak Pajak Minimum Global

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sebanyak 722 grup usaha terdampak penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) yang mulai diadopsi Indonesia sejalan dengan reformasi perpajakan internasional OECD dan G20. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, dari ratusan grup tersebut terdapat 46 grup perusahaan multinasional yang telah memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT berdasarkan *country by country report* periode 2021–2024. "Ada sekitar 722 grup yang terdampak penerapan GMT. Ada 46 grup *multinational companies* yang memenuhi syarat kewajiban pelaporan GMT berdasarkan *country by country report* 2021–2024," ujar Bimo.

